

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemerintah Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mendorong pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi, yaitu menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah otonom agar daerah mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Alumbida, (2020) Kebijakan desentralisasi tersebut menuntut pemerintah untuk menyediakan pendanaan yang memadai, yang kemudian dialokasikan melalui APBD dan pada saatnya akan direalisasikan melalui Kas Negara atau Kas Daerah sebagai bentuk pelaksanaan anggaran guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Halim, (2018) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran merupakan tingkat pencapaian atas estimasi anggaran yang direncanakan dalam periode tertentu dan menunjukkan seberapa besar realisasi anggaran yang telah digunakan pada suatu waktu tertentu. Dalam sektor publik, penyerapan anggaran dipahami sebagai proses pencairan atau penggunaan anggaran yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Proses ini menjadi bagian penting dari siklus anggaran yang meliputi perencanaan, penetapan

serta pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan dan penyerapan anggaran, hingga tahap pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.

Penyerapan anggaran berperan sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah direncanakan. Namun pada praktiknya, banyak pemerintah daerah mengalami kendala berupa rendahnya tingkat penyerapan anggaran khususnya di Kabupaten Bangkalan yang mengakibatkan pelaksanaan anggaran yang tidak merata sehingga berpotensi menurunkan efektivitas Realisasi anggaran yang ditandai dengan kasus yang terjadi seperti Kondisi Jembatan Gladak Lanjeng yang semakin memprihatinkan menunjukkan bagaimana keterlambatan perbaikan infrastruktur terjadi akibat penyerapan anggaran yang tidak optimal.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan, melalui Dinas PUPR, telah mengajukan perbaikan secara menyeluruh, namun usulan tersebut berulang kali tertunda karena *refocusing* anggaran yang mengalihkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum ke program lain. Situasi ini menegaskan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, kebijakan *refocusing*, serta prioritas belanja daerah yang menentukan apakah suatu program dapat direalisasikan tepat waktu atau tidak. Kasus Jembatan Gladak Lanjeng pun memberikan gambaran bahwa keterbatasan anggaran dan pergeseran kebijakan dapat menghambat realisasi fisik pembangunan, sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal dan berdampak pada pelayanan publik.

Kasus tertundanya perbaikan Jembatan Gladak Lanjeng menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyerapan anggaran yang tidak optimal dapat menyebabkan keterlambatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang sangat mereka butuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Masyarakat sekitar, yang setiap hari melintasi jembatan tersebut, merasakan langsung bagaimana minimnya anggaran yang terserap menghambat perbaikan yang seharusnya segera dilakukan demi keselamatan mereka.

Ketika anggaran perbaikan berulang kali terkena *refocusing*, proses pembangunan yang direncanakan tidak berjalan, sehingga masyarakat harus menghadapi kondisi jembatan yang semakin memburuk dan berisiko. Situasi ini menegaskan bahwa penyerapan anggaran yang baik memegang peran penting dalam memastikan pelayanan publik dapat diberikan secara maksimal, karena semakin besar anggaran yang terserap tepat waktu, semakin cepat pula kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan penyerapan anggaran terlihat jelas melalui dampak nyata yang mereka alami saat proses penyerapan anggaran tidak berjalan sesuai harapan.

Penyerapan anggaran pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan, sehingga setiap faktor memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah mengoperasikan proses anggaran dengan kualitas sumber daya manusia yang beragam, sehingga kompetensi aparatur menentukan ketepatan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran. Selain itu, pemerintah menyusun perencanaan anggaran melalui proses perumusan

kebutuhan dan prioritas, sehingga perencanaan yang tidak akurat atau sering berubah menghambat kelancaran realisasi anggaran.

Proses realisasi anggaran juga bergantung pada regulasi yang berlaku, di mana aturan yang kompleks atau tidak harmonis antar instansi memperlambat administrasi pelaksanaan anggaran. Lebih jauh, organisasi pemerintah menerapkan sistem pengendalian internal untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai prosedur, sehingga lemahnya pengendalian internal meningkatkan potensi keterlambatan, inefisiensi, dan rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Dengan demikian, kualitas SDM, perencanaan anggaran, regulasi, dan sistem pengendalian internal membentuk fondasi utama yang memengaruhi keberhasilan penyerapan anggaran di pemerintah daerah.

Faktor pertama yang memengaruhi penyerapan anggaran adalah kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting yang memengaruhi penyerapan anggaran karena aparatur pemerintah melaksanakan seluruh proses pengelolaan anggaran dengan kemampuan dan kompetensi yang berbeda-beda. Organisasi yang memiliki pemahaman memadai tentang prosedur keuangan, regulasi, dan sistem administrasi mendorong terlaksananya kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran. Sebaliknya, keterbatasan keterampilan teknis dan lemahnya pemahaman terhadap mekanisme anggaran menghambat kelancaran realisasi anggaran sehingga menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran di berbagai instansi pemerintah.

Faktor kedua yang memengaruhi penyerapan anggaran adalah perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran memberikan dasar bagi pelaksanaan anggaran karena pemerintah daerah menyusun program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan, prioritas pembangunan, serta kapasitas pelaksanaan. Perencanaan yang akurat, realistis, dan didukung data yang memadai mempermudah pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran. Namun, perencanaan yang kurang matang, sering mengalami revisi, atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak optimal.

Faktor ketiga yang memengaruhi penyerapan anggaran adalah regulasi. Regulasi menjadi landasan penting dalam proses penyerapan anggaran karena instansi pemerintah melaksanakan seluruh tahapan realisasi mengacu pada aturan yang berlaku. Regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah diimplementasikan mempercepat proses administrasi seperti verifikasi dokumen, penyusunan kontrak, dan pencairan dana. Sebaliknya, regulasi yang rumit, tidak sinkron antarinstansi, atau sering berubah menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanaan anggaran yang kemudian dapat menyebabkan penyerapan anggaran terlambat dan tidak merata sepanjang tahun anggaran.

Faktor keempat yang memengaruhi penyerapan anggaran adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran karena pemerintah daerah melakukan pengawasan penggunaan anggaran melalui mekanisme pengendalian yang

ditetapkan untuk menjamin kepatuhan terhadap prosedur. Pengendalian internal yang kuat, seperti audit internal yang efektif, pemantauan berkala, serta pemisahan fungsi yang jelas mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran dan mengurangi risiko kesalahan administratif. Namun, pengendalian internal yang lemah atau tidak dijalankan secara konsisten menyebabkan keterlambatan proses, ketidaktepatan pelaksanaan, hingga potensi penyimpangan yang pada akhirnya menghambat tingkat penyerapan anggaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani, (2022) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, (2020) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan penelitian yang dilakukan oleh Nursela, (2022) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, (2022) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutono, (2022) menunjukkan bahwa regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, (2020) menunjukkan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggeadi, (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Glenly

Annalpida, (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu, ditemukan bahwa hubungan antara kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, regulasi, dan sistem pengendalian internal terhadap penyerapan anggaran masih menunjukkan inkonsistensi temuan. Beberapa penelitian seperti Handayani (2022), Nursela (2022), Sutono (2022), serta Anggeadi (2023) menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun, penelitian lain seperti Rahmawati (2020), Handayani (2022), dan Glenly Annalpida (2022) justru menemukan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengaruh setiap faktor dapat bervariasi tergantung pada konteks organisasi, kondisi internal daerah, serta mekanisme pengelolaan anggaran yang diterapkan, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safpremi & Putri, (2022) yang menggunakan variabel penyerapan anggaran, kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa sebagai variabel independen, penelitian ini menggunakan variabel kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, regulasi dan system pengendalaian internal sebagai variabel independen. Selain itu penelitian sebelumnya menggunakan objek kabupaten pasaman sedangkan

penelitian ini menggunakan variabel kabupaten bangkalan yang sebelumnya belum pernah digunakan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kualitas sumber daya manusia (berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran ?
2. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran ?
3. Apakah regulasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran ?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran.
2. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.
3. Untuk menganalisis pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran.
4. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penyerapan anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Menambah literatur akademik terkait faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran, terutama dalam konteks kualitas SDM, perencanaan anggaran, regulasi, dan sistem pengendalian internal.
- b) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian terkait manajemen keuangan sektor publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi instansi pemerintah: memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran melalui perbaikan kompetensi SDM, penyusunan perencanaan anggaran yang lebih realistis, penyempurnaan regulasi, serta penguatan sistem pengendalian internal.
- b) Bagi pengambil kebijakan: menjadi dasar evaluasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan anggaran agar penyerapan lebih optimal setiap tahun anggaran.